



Matangkan Skema Pasang Portal

■ Kesiapan Perencanaan Menuju Malioboro Full Pedestrian 2026

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY tengah mematangkan rencana penerapan kawasan rendah emisi di jantung Kota Yogyakarta dengan menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian penuh pada 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan Malioboro sebagai ruang publik yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Kepala Dishub DIY, Chrestina Erni Widyastuti, menegaskan, langkah ini akan diikuti dengan pemasangan portal pembatas dan pelarangan total kendaraan berbahan bakar minyak demi meningkatkan kualitas ruang publik serta kenyamanan pejalan kaki. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dalam menata lalu lintas, parkir, serta menghadirkan moda transportasi ramah lingkungan di pusat kota. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penataan ruang publik yang berkelanjutan sekaligus upaya nyata pengurangan emisi di kawasan inti perkotaan.

Sebagai tahapan awal me-

RUANG PUBLIK

- Dinas Perhubungan DIY tengah mematangkan rencana penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian penuh pada 2026.
- Kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan Malioboro sebagai ruang publik yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.
- Langkah ini akan diikuti dengan pemasangan portal pembatas dan pelarangan total kendaraan berbahan bakar minyak.

nuju kawasan pedestrian penuh, Dishub DIY akan memberlakukan pembatasan ketat terhadap seluruh kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) yang selama ini melintasi Jalan Malioboro. Aturan ini tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga mencakup angkutan umum berbasis BBM, becak motor (bentor), hingga layanan transportasi Maxride.

Erni menegaskan bahwa akses kawasan nantinya akan difokuskan sepenuhnya pada moda transportasi yang tidak menghasilkan polusi gas buang. "Jika Malioboro sudah menjadi kawasan pedestrian penuh, kendaraan yang masih menggunakan BBM tidak bisa masuk. Yang diperbolehkan hanya transportasi ramah lingkungan," kata Erni, Senin (9/2).

Untuk menjaga mobilitas pengunjung dan warga tetap lancar, Pemda DIY telah menyiapkan infrastruktur pendukung berupa transportasi berbasis energi bersih. Saat ini, armada becak listrik dan bus listrik Si Thole telah disiapkan sebagai alternatif utama. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan berbagai moda transportasi berbasis energi alternatif lainnya.

Pemerintah juga memperhatikan urat nadi ekonomi para pelaku usaha di Malioboro. Dishub DIY berencana memasang portal pembatas di sejumlah titik akses masuk untuk mengontrol arus kendaraan. Khusus untuk distribusi barang, akan disiapkan skema pengaturan bongkar muat logistik agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kenyamanan pejalan kaki.

Erni mengingatkan bahwa transformasi Malioboro tidak bisa hanya mengandalkan re-

gulasi di atas kertas. Diperlukan konsistensi dalam penegakan aturan serta kesadaran tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. "Ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat," imbuhnya.

Beban lalu lintas

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti In-drayanti, mengungkapkan bahwa mengubah Malioboro menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor tidak bisa dilihat secara parsial. Malioboro adalah bagian dari sistem jaringan jalan yang saling terkoneksi. Penutupan akses di jalan utama akan berdampak langsung pada beban lalu lintas di jalan sekitarnya, seperti Jalan Mataram dan Jalan Bhayangkara.

Pemerintah juga tengah mengkaji karakteristik tiap segmen di sepanjang Sumbu Filosofi, mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, hingga Panggung Krapyak. Menurut Ni Made, karakteristik ekonomi dan sosial di setiap segmen berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak seragam dalam penerapan Zona Emisi Rendah (*Low Emission Zone/LEZ*).

Salah satu poin krusial dalam masa transisi ini adalah pengaturan logistik pelaku usaha dan ketersediaan lahan parkir. Ni Made menyebutkan, konsep pedestrian penuh bukan berarti memutus total akses mobilitas barang, melainkan mengaturnya melalui sistem yang lebih ketat. Pemda DIY mendorong munculnya kantong-kantong parkir komunal dan pemanfaatan lahan masyarakat di lorong-lorong sekitar Malioboro untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) maupun kendaraan pengunjung. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005